

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER I T.A 2026



099234

2026

**Pengadilan Negeri
Pangkalpinang**



PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

Semester I Tahun Anggaran 2026
Tingkat Satuan Kerja (SATKER)

(005.03.099234)

Jl. Jendral Sudirman No.09 Pangkalpinang
Pangkalpinang - Bangka Belitung 33121
Telp. 0717422417 Fax. 0717422418
e-mail : keuangan@pn-pangkalpinang.go.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG

Semester I Tahun Anggaran 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jendral Sudirman No.09 Pangkalpinang

Telp. 0717422417 Fax. 0717422418

Pangkalpinang - Bangka Belitung 33121

e-mail : keuangan@pn-pangkalpinang.go.id

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan Peraturan S-154/PB/ 2026 Tanggal 03 Juli 2026 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2026. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



EPIYANDA

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iv
Pernyataan Telah Direviu	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum	10
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalpinang	11
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran.....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	23
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.2 Belanja	24
B.2.1 Belanja Barang	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Kewajiban Jangka Pendek	29
C.3. Ekuitas	30
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	30
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	30
D.2 Beban Persediaan	30
D.3 Beban Barang dan Jasa	31
D.4 Beban Pemeliharaan.....	31

D.5	Beban Perjalanan Dinas	32
D.6	Kegiatan Non Operasional	32
D.7	Pos Luar Biasa	33
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
E.1	Ekuitas Awal	34
E.2	Surplus (defisit) LO	34
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	34
E.4	Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Entitas	34
E.5	Transaksi Antar Entitas	34
E.6	Kenaikan / Penurunan Ekuitas	34
E.7	Ekuitas Akhir	34
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	35
F.1	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	35
F.2	Pengungkapan Lain-lain	35



Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Jl. Jendral Sudirman No.09 Pangkalpinang - Bangka Belitung 33121

Telp. 0717422417 Fax. 0717422418 e-mail : keuangan@pn-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

EPIYANDA



Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Jl. Jendral Sudirman No.09 Pangkalpinang - Bangka Belitung 33121

Telp. 0717422417 Fax. 0717422418 e-mail : keuangan@pn-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2026 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam Laporan Keuangan adalah penyajian manajemen Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Reviu utama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa Laporan Keuangan yang kami sebutkan diatas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



EPIYANDA

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Semester I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 17.444.000 atau mencapai 54,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 32.336.000.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 121.643.651 atau mencapai 43,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 282.093.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset dan ekuitas per 30 Juni 2026. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 499.570.050, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 499.570.050 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar

Rp. 0, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp. 491.204.550, dan Persediaan sebesar Rp. 8.8365.500

Nilai Kewajiban per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 491.204.550 yang merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 491.204.550 yang terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 491.204.550, Utang yang Belum Ditagihkan sebesar Rp.0, dan Uang Muka dari KPPN sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.365.500, yang terdiri dari Ekuitas sebesar Rp.8.365.500.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus (defisit) dari kegiatan non-operasional, surplus (defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 17.444.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 153.046.891. Sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 135.602.891).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 135.602.891).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 33.905.050 dikurangi surplus (defisit)-LO sebesar (Rp. 135.602.891) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0. dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 110.063.341 dan dikurangi Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. (25.539.550) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp. 8.365.500.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2026, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	2026			2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	0	0	0.00	0
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	32.336.000	17.444.000	54.00	21.137.500
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		32.336.000	17.444.000	54.00	21.137.500
B.	Belanja Negara	B.2	0	0	0.00	0
1.	Belanja Pegawai	B.2.1	0	0	0.00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2	282.093.000	121.643.651	43.00	154.389.402
3.	Belanja Modal	B.2.3	0	0	0.00	0
	Jumlah Belanja Negara		282.093.000	121.643.651	43.00	154.389.402

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



EPIYANDA

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025
(dalam satuan Rupiah)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

na Anggaran,



III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025 (dalam satuan Rupiah)

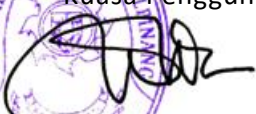
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
KEGIATAN OPERASIONAL	D. 1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1		
Pendapatan Pajak Penghasilan	D.1.1.1	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah	D.1.1.2	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	D.1.1.3	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	D.1.1.4	0	0
Pendapatan Cukai	D.1.1.5	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	D.1.1.6	0	0
Pendapatan Bea Masuk	D.1.1.7	0	0
Pendapatan Bea Keluar	D.1.1.8	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	D.1	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.2	0	0
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1.2.1	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	D.1.2.2	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.2.3	17.444.000	21.137.500
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		17.444.000	21.137.500
PENDAPATAN HIBAH	D.1.3		
Pendapatan Hibah	D.1.3.1	0	0
Jumlah Pendapatan Hibah		0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		17.444.000	21.137.500

BEBAN OPERASIONAL		D. 2		
	Beban Pegawai	D.2 .1	0	0
	Beban Persediaan	D.2 .2	81.064.490	48.927.647
	Beban Barang dan Jasa	D.2 .3	71.982.401	100.493.302
	Beban Pemeliharaan	D.2 .4	0	0
	Beban Perjalanan Dinas	D.2 .5	0	0
	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2 .6	0	0
	Beban Bunga	D.2 .7	0	0
	Beban Subsidi	D.2 .8	0	0
	Beban Hibah	D.2 .9	0	0
	Beban Bantuan Sosial	D.2 .10	0	0
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2 .11	0	0
	Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	D.2 .12	0	0
	Beban Transfer	D.2 .13	0	0
	Beban Lain-lain	D.2 .14	0	0
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		153.046.891	149.420.949
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(135.602.891)	(128.283.449)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		D. 3		
	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3 .1		
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3 .1.1	0	0
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3 .1.2	0	0
	Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.3 .2		
	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3 .2.1	0	0
	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.3 .2.2	0	0
	Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.3 .3	0	0

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	.3.1	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	.3.2	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			0	0
POS LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA	D.4		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA			0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL			(135.602.891)	(128.283.449)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Pangkalpinang, 30 Juni 2026
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

EPIYANDA

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E. 1	33.905.050	3.420.700
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(135.602.891)	(128.283.449)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 4	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 6	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 7	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 8	0	0
Lain-lain	E. 9	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 10	110.063.341	141.628.407
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 11	(25.539.550)	13.344.958
Ekuitas Akhir		8.365.500	16.765.658

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

Pangkalpinang, 30 Juni 2026

ii
anggaran,



V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.05/2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No PER-8/PB/2023 Tanggal 8 September 2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga;
17. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-154/PB/2026 Tanggal 03 Juli 2026 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2026.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalpinang

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Peradilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Penyusunan Laporan Keuangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi dan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor : S- 147/PB/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun Anggaran 2026 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang telah digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang dirancang berdasarkan proses bisnis SPAN yang baru. Proses bisnis tersebut dituangkan dalam beberapa modul, yaitu : Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Pelaporan, dan Modul Administrator. Melalui SAKTI, aplikasi-aplikasi tersebut akan mengakses database yang sama (*single database*).

Proses migrasi saldo awal dari aplikasi Persediaan, SIMAK dan SAIBA ke aplikasi SAKTI dari satuan kerja yang secara struktural berada dibawah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sudah dilaksanakan sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-142/PB/2022 Tanggal 14 Juni 2022 dan sudah mengupload Berita Acara Migrasi (BAM) di aplikasi MONSAKTI.

Penyusunan Laporan Keuangan dalam aplikasi SAKTI dengan modul Persediaan, Aset dan GLP (General Ledger dan Pelaporan). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Aset BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan kantor dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - d) Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 . Termasuk dalam ruang lingkup

objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2019. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- e) Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada laporan keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- f) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- g) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek.
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang.
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

*Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp. 17.444.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 17.444.000 atau mencapai 54,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 32.336.000.

Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	0	0
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	2.310.000	1.480.000	64.07
Pendapatan Ongkos Perkara	7.110.000	4.330.000	60.9
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.876.000	11.634.000	50.86
Total Pendapatan	32.336.000	17.444.000	53.95

Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.693.500 atau 17.47 persen dibandingkan Juni 2025. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya Pendapatan Uang Meja Leges dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan;
2. Menurunnya Ongkos Perkara; dan
3. Menurunnya Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Perbandingan Realisasi PNBP 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Perbandingan Realisasi PNBP
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10.000	(10.000)	(100)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.480.000	1.210.000	270.000	22.31
Pendapatan Ongkos Perkara	4.330.000	4.440.000	(110.000)	(2.48)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	11.634.000	15.477.500	(3.843.500)	(24.83)
Total Pendapatan	17.444.000	21.137.500	(3.693.500)	(17.47)

B.2 Belanja

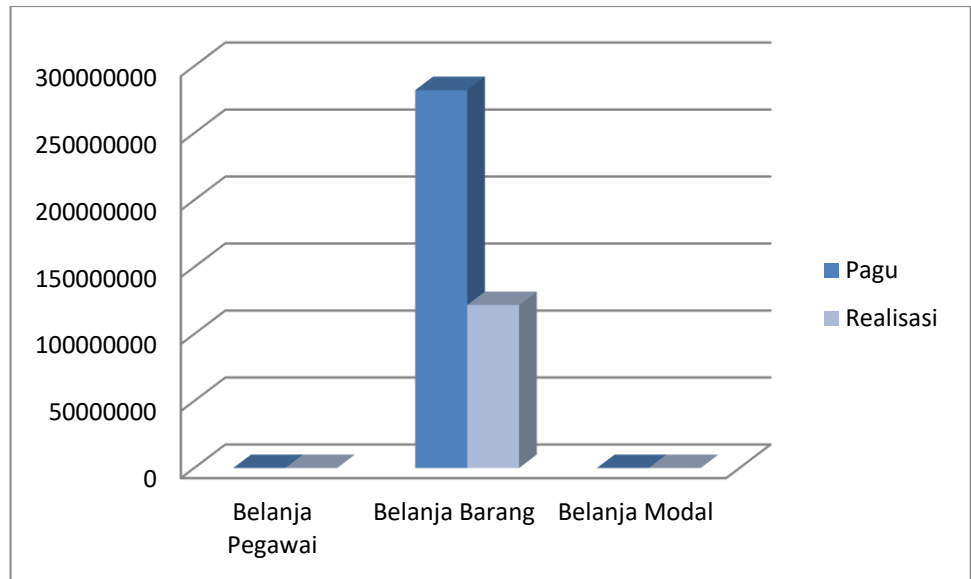
*Belanja Negara
Rp. 154.389.402*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalpinang per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp. 121.643.651 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 43.12 persen dari anggaran senilai Rp. 282.093.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0.00
Belanja Barang	282.093.000	121.643.651	43.12
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja Bruto	282.093.000	121.643.651	43.12
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Total Belanja Netto	282.093.000	121.643.651	43.12

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026
(dalam satuan Rupiah)

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 2025

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp. 32.745.751 atau sebesar (21.21) persen dari realisasi tahun lalu pada periode 2025. Penurunan ini disebabkan keterbatasan pagu anggaran.

Perbandingan realisasi belanja 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0.00
Belanja Barang	121.643.651	154.389.402	(32.745.751)	(21.21)
Belanja Modal	0	0	0	0.00
Belanja	121.643.651	154.389.402	(32.745.751)	(21.21)

B.2.1 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp. 121.643.651

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalpinang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 121.643.651 dan Rp. 154.389.402

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026 mengalami Penurunan sebesar Rp. (32.745.751) atau (21.21) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	Rp.
Belanja Barang Operasional	16.308.500	45.113.500	(28.805.000)	(63.85)
Belanja Barang Non Operasional	29.483.100	41.111.776	(11.628.676)	(28.29)
Belanja Barang Persediaan	47.903.250	39.064.000	8.839.250	22.63
Belanja Jasa	28.948.801	29.100.126	(151.325)	(0.52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	0
Total Belanja Bruto	121.643.651	154.389.402	(32.745.751)	(21.21)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0.00
Total Belanja Netto	121.643.651	154.389.402	(32.745.751)	(21.21)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp. 499.570.050

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 499.570.050 dan Rp. 35.663.050

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya Dan Setara Kas	491.204.550	0
Persediaan	8.365.500	35.663.050
Total Aset Lancar	499.570.050	35.663.050

C.1.1. Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp. 491.204.550

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan Per Tanggal 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 491.204.550 dan Rp. 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Kasir Kepaniteraan, yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025**
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Kas Lainnya dan Setara Kas	491.204.550	0
Jumlah	491.204.550	0

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp. 8.365.500

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.365.500 dan Rp. 35.663.050. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Barang Konsumsi	8.365.500	35.663.050
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Total	8.365.500	35.663.050

C.2. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.1 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp. 491.204.550*

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 491.204.550 dan Rp. 1.758.000

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Utang kepada Pihak Ketiga	491.204.550	1.758.000
Jumlah	491.204.550	1.758.000

C.2.2 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp. 0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Adapun rincian Uang Muka dari KPPN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka dari KPPN
XPer 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2025
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.3. Ekuitas

Ekuitas
Rp. 8.365.500

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.365.500 dan Rp. 33.905.050. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas
Per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2024
Ekuitas	8.365.500	33.905.050
Jumlah	8.365.500	33.905.050

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 17.444.000 dan Rp21.137.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	40.000	0	0
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Peradilan	2.310.000	1.480.000	64.07
Pendapatan Ongkos Perkara	7.110.000	4.330.000	60.9
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.876.000	11.634.000	50.86
Total Pendapatan	32.336.000	17.444.000	53.95

D.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 81.064.490 dan Rp. 48.927.647. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	81.064.490	48.927.647	32.136.843	65.68
Total Beban Persediaan	81.064.490	48.927.647	32.136.843	65.68

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp. 71.982.401

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 71.982.401 dan Rp. 100.493.302. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.550.500	35.202.000	(21.651.500)	(61.51)
Beban Jasa Konsultan	28.948.801	29.100.126	(151.325)	(0.52)
Beban Bahan	29.483.100	36.191.176	(6.708.076)	(18.54)
Total Beban Jasa	71.982.401	100.493.302	(28.510.901)	(28.37)

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Jasa	0	0	0	0

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Dinas
Rp. 0

Perjalanan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Perjalanan Dinas
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0

D.6 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan
Operasional
Rp. 0

Non Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Beban Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0.00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0.00

--	--	--	--	--

D.7 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
Per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0	0.00
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0.00

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp.33.905.050

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.33.905.050 dan Rp. 3.420.700

E.2 Surplus (defisit) LO

Surplus (Defisit) LO
(Rp. 135.602.891)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp. 135.602.891) dan (Rp. 128.283.449). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar
Rp. 0

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0.

E.4 Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Entitas

Koreksi yang
Menambah
/Mengurangi Entitas
Rp. 0

Koreksi yang menambah/mengurangi Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp. 110.063.341

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 110.063.341 dan Rp. 141.628.407

E.6 Kenaikan / Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan
Entitas
Rp. (25.539.550)

Kenaikan / Penurunan Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. (25.539.550)dan 13.344.958

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp. 8.365.500

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.365.500 dan Rp. 16.765.658.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1 Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

-

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada periode ini.

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada belanja akrual

F.2.3 Rekening Pemerintah

Rekening yang digunakan yakni rekening virtual nomor 654440992341000 a.n. BPg 015 PN PANGKALPINANG-03 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.0

F.2.4 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 006301001686300 a.n. RPL 015 PN PANGKALPINANG UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3 pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp.491.204.550.

Sedangkan dalam Brankas Kasir Perdata per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp3.466.995. yang meliputi :

1. Biaya Perkara sebesar	Rp.	1.153.995,-
2. Biaya Eksekusi sebesar	Rp.	0,-
3. Konsinyasi sebesar	Rp.	0,-
4. Titipan Pidana sebesar	Rp.	0,-
5. PHI sebesar	Rp.	2.313.000,-
6. Eksekusi PHI	Rp.	0

Jadi Total Uang yang dikelola oleh bagian Perdata Pengadilan Negeri Pangkalpinang adalah sebesar Rp.4 94.671.545.

**REKAPITULASI UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA LAINNYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG
UNTUK YANG BERAKHIR 30 Juni 2025**

URAIAN	KEADAAN KEUANGAN (Rp)				TEMPAT PENYIMPANAN (Rp)	
	SISA AWAL	MASUK	KELUAR	SISA	BANK	BRANKAS
1	2	3	4	5	6	7
Buku Induk Keuangan Perkara Perdata	21.059.075	94.732.000	83.892.700	21.898.375	30.744.380	1.153.995
Buku Keuangan Biaya Eksekusi	8.518.670	33.565.000	10.616.000	31.467.670	31.467.670	0
Buku Keuangan Konsinyasi	428.992.500	0	0	428.992.500	428.992.500	0
Buku Keuangan Pidana	0	0	0	0	0	0
Buku Keuangan PHI	2.046.000	4.888.000	4.621.000	2.313.000	0	2.313.000
Buku Keuangan Eksekusi PHI	4.794.000	0	4.794.000	0	0	0
Jumlah	465.410.245	133.185.000	103.923.700	494.671.545	491.204.550	3.466.995

F.2.5 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Penyusunan Belanja Pegawai Pemerintah Pusat yang dirinci menurut Fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the function of government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme Monetary Fund (IMF) dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan Agama (recreation, culture, and religion).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci kedalam sebelas Fungsi sebagai berikut :

1. Pelayanan umum
2. Pertahanan
3. Ketertiban dan Keamanan
4. Ekonomi
5. Lingkungan Hidup
6. Perumahan dan Fasilitas Umum
7. Kesehatan
8. Pariwisata dan budaya
9. Agama
10. Pendidikan
11. Perlindungan Sosial

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2026 pada UAKPA Pengadilan Negeri Pangkalpinang antara lain sebagai berikut:

**LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Kementrian/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Unit Organisasi : 03 Badan Perdailan Umum MA RI
Fungsi ; 03 Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : 03.4 Peradilan

Kode Sater	Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket.
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
099234	1.049.AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	750.000	0	0	2	1	Kegiatan	50%	Sudah dilaksanakan Di bulan Juni tetapi di Bayarkan di bulan Juli 2026
099234	1049.BCA.U03	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Barat	151.054.000	77.389.350	51.2	350	157	Perkara	44.9	Karena realisasi anggaran untuk 1 perkara pada satuan kerja melebihi anggaran yang telah ditetapkan
099234	1049.BCA.U04	Perkara pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Barat	35.177.000	10.591.500	30.1	40	13	Perkara	32.5	Adanya kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan
099234	1049.BCA.U05	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah barat	23.112.000	4.714.000	20.4	30	6	Perkara	20	Karena realisasi anggaran untuk 1 perkara pada satuan kerja melebihi anggaran yang telah ditetapkan
099234	1049.QBA.U32	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	72.000.000	28.948.801	40.2	340	228	Orang	67.1	Adanya kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan

F.2.6 Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang ditetapkan melalui peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah tahun 2024,pada UAKPA Pengadilan Negeri Pangkalpinang terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Prioritas Nasional I-Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Prioritas Nasional 7-Memperkuat Reformasi Politik,Hukum,dan birokrasi,Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,Narkoba,Judi dan Penyelundupan

Pelaksanaanya diantaranya melalui 1 (Satu) Program prioritas,1(dua) Kegiatan Prioritas di satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Pagu Mencapai Rp.72.000.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 28.948.801

Kementrian/Lembaga : 005 Mahkamah Agung RI
Unit Organisasi : 03 Badan Perdailan Umum MA RI
Fungsi ; 03 Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : 03.4 Peradilan

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.000.000	28.948.801	40.2	Orang	340	228	67.1%
Total	72.000.000	28.948.801	40.2				

F.2.7 Revisi DIPA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah melakukan 3 (Tiga) kali revisi DIPA sampai dengan periode 30 Juni 2025 yaitu :

- Revisi ke-1 tanggal 24 Desember 2025, yaitu Revisi Direktif Presiden 322.300.000 282.093.000 DJA
- Revisi ke-2 tanggal 11 Februari 2026 Perubahan rencana 282.093.000 282.093.000 KANWIL panarikan dana /atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Triwulan I
- Revisi ke-3 tanggal 15 April 2026 Perubahan rencana penarikan 282.093.000 282.093.000 KANWIL dana/atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA Revisi POK

F.2.8 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Sampai dengan 30 Juni 2026, Pengadilan Negeri Pangkalpinang belum melakukan ralat SPM.

F.2.9 Catatan Penting Lainnya

Data staf pengelola anggaran tahun 2026, yakni:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Epiyanda, S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Tri Palupi, S.Kom.
Pejabat Penandatanganan SPM	: Suhartono, S.E.
Bendahara Pengeluaran	: Malviana, S.H.
Bendahara Penerimaan	: Maya Fatma Pratiwi, S.H.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/26 9:47 AM
 Tgl Cetak : 28/07/26 10:52 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	17,444,000	21,137,500	(3,693,500)	(17.474)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	17,444,000	21,137,500	(3,693,500)	(17.474)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	17,444,000	21,137,500	(3,693,500)	(17.474)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	81,064,490	48,927,647	32,136,843	65.682
Beban Barang dan Jasa	71,982,401	100,493,302	(28,510,901)	(28.371)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
 SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 10:52 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	153,046,891	149,420,949	3,625,942	2.427
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(135,602,891)	(128,283,449)	(7,319,442)	5.706
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(135,602,891)	(128,283,449)	(7,319,442)	5.706
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(135,602,891)	(128,283,449)	(7,319,442)	5.706

Keterangan :
FINAL

Pangkal Pinang, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EPIYANDA, S.E.
NIP 197704052006041003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/26 9:34 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 10:53 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	33,905,050	3,420,700	30,484,350	891.17
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135,602,891)	(128,283,449)	(7,319,442)	5.71
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	110,063,341	141,628,407	(31,565,066)	(22.29)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(25,539,550)	13,344,958	(38,884,508)	(291.38)
EKUITAS AKHIR	8,365,500	16,765,658	(8,400,158)	(50.1)

Keterangan :

FINAL

Pangkal Pinang, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EPIYANDA, S.E.

NIP 197704052006041003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Umum 03

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG 099234

Tgl Data : 28/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 10:53 AM

Halaman : 1

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	32,336,000	17,444,000	(14,892,000)	54	41,448,000	21,137,500	20,310,500	51
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	32,336,000	17,444,000	(14,892,000)	54	41,448,000	21,137,500	20,310,500	51
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	32,336,000	17,444,000	(14,892,000)	54	41,448,000	21,137,500	20,310,500	51
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	282,093,000	121,643,651	(160,449,349)	43	326,332,000	154,389,402	171,942,598	47
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	282,093,000	121,643,651	(160,449,349)	43	326,332,000	154,389,402	171,942,598	47
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

ESELON I
: Ditjen Badan Peradilan Umum 03

Tgl Cetak : 28/07/26 10:53 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_satker_new_poc

Keterangan :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP 197704052006041003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (099234) PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Tgl Data : 28/07/26 9:47 AM

Tgl Cetak : 28/07/26 10:53 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	491,204,550	0	491,204,550	0.00
Persediaan	8,365,500	35,663,050	(27,297,550)	(76.54)
JUMLAH ASET LANCAR	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81
JUMLAH ASET	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
JUMLAH KEWAJIBAN	491,204,550	1,758,000	489,446,550	27,841.10
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH EKUITAS	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH EKUITAS	8,365,500	33,905,050	(25,539,550)	(75.33)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499,570,050	35,663,050	463,907,000	1,300.81

Keterangan :

FINAL

Pangkal Pinang, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EPIYANDA, S.E.
NIP 197704052006041003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap	: LRA.B.S.2
ESELON I	: 03	Ditjen Badan Peradilan Umum	Tanggal	: 28/07/26 10:54 AM
WILAYAH/PROVINSI	: 3000	BANGKA BELITUNG	Halaman	: 1
SATUAN KERJA	: 099234	PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG	Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data	: 28/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65,900,000	56,095,000	15,308,500	0	15,308,500	27.29	40,786,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	65,900,000	56,095,000	15,308,500	0	15,308,500	27.29	40,786,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	84,908,000	68,385,000	29,483,100	0	29,483,100	43.11	38,901,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	84,908,000	68,385,000	29,483,100	0	29,483,100	43.11	38,901,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,992,000	83,263,000	47,903,250	0	47,903,250	57.53	35,359,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	95,992,000	83,263,000	47,903,250	0	47,903,250	57.53	35,359,750
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	72,000,000	72,000,000	28,948,801	0	28,948,801	40.21	43,051,199
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	72,000,000	72,000,000	28,948,801	0	28,948,801	40.21	43,051,199
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,500,000	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
	JUMLAH BELANJA	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 03
: 3000
: 099234

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/07/26 10:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
			4	5	6=4-5	
1	2	3				7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	40,000	0	0	0	0
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		1,480,000	0	1,480,000	64.07
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2,310,000	4,330,000	0	4,330,000	60.9
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7,110,000	11,634,000	0	11,634,000	50.86
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22,876,000				
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	53.95
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	53.95
	JUMLAH PENDAPATAN	32,336,000	17,444,000	0	17,444,000	53.95

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 005
: 03
: 3000
: 099234
: KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/26 10:55 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/7/26 10:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	65,900,000	56,095,000	15,308,500	0	15,308,500	27.29	40,786,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	65,900,000	56,095,000	15,308,500	0	15,308,500	27.29	40,786,500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	84,908,000	68,385,000	29,483,100	0	29,483,100	43.11	38,901,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	84,908,000	68,385,000	29,483,100	0	29,483,100	43.11	38,901,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	95,992,000	83,263,000	47,903,250	0	47,903,250	57.53	35,359,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	95,992,000	83,263,000	47,903,250	0	47,903,250	57.53	35,359,750
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	72,000,000	72,000,000	28,948,801	0	28,948,801	40.21	43,051,199
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	72,000,000	72,000,000	28,948,801	0	28,948,801	40.21	43,051,199
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,500,000	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,500,000	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349
	JUMLAH BELANJA	322,300,000	282,093,000	121,643,651	0	121,643,651	43.12	160,449,349

RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
593111	Beban Persediaan konsumsi	81,064,490
JUMLAH		81,064,490

RINCIAN BEBAN BARANG OPERASIONAL TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN JUNI 2026

calk_lo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	Jumlah
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,550,500
521211	Beban Bahan	29,483,100
522131	Beban Jasa Konsultan	28,948,801
JUMLAH		71,982,401